

Pendampingan Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo Berbasis Elektronik (SPBE)

M Noer Fadli Hidayat

Universitas Nurul Jadid, Indonesia
{fadli@unuja.ac.id,}

Submission: 2023-08-19

Received: 2024-03-31

Published: 2024-03-31

Keywords: Information and Communication Technology, SPBE, Analysis

Abstract. The Indonesian government is focusing on the development of information and communication technology as a means to improve public services to the community. This is reflected in the issuance of the Electronic-Based Government System (EBS) guidelines. The Probolinggo District Government also implements good governance to improve the welfare of the community. In 2022, Probolinggo Regency has carried out an SPBE evaluation which resulted in an SPBE index value of 2.42 and received a Fair predicate. This Community Service (PkM) aims to analyze the aspects that have the lowest contribution to the evaluation of SPBE of the Probolinggo Regency Government. Several aspects of the SPBE assessment are presented as having the lowest contribution value which results in a lack of SPBE index value for the Probolinggo Regency Government. The aspect with the lowest contribution is located in the SPBE Governance domain, namely the SPBE Organizer aspect and is located in the SPBE Management domain, namely the SPBE Management Implementation aspect and the ICT Audit aspect. Each aspect has its own weaknesses as a measure of the low value obtained. Recommendations for improvement to increase the evaluation value in each aspect in the hope of building quality work in the Probolinggo Regency Government that is effective, efficient, and productive as well as harmonizing the SPBE architecture and SPBE plan map from the central government.

Katakunci: Teknologi Informasi dan Komunikasi, SPBE, Analisis

Abstrak. Pemerintah Indonesia tengah berfokus pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam penerbitan pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2022, Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan evaluasi SPBE yang menghasilkan nilai indeks SPBE sebesar 2.42 dan mendapatkan predikat Cukup. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk menganalisis aspek yang memiliki kontribusi paling rendah pada evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Beberapa

aspek penilaian SPBE dipresentasikan memiliki nilai kontribusi paling rendah yang mengakibatkan kurangnya nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Aspek dengan kontribusi terendah terletak pada domain Tata Kelola SPBE yaitu aspek Penyelenggara SPBE dan terletak pada domain Manajemen SPBE yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan aspek Audit TIK. Masing-masing aspek memiliki kelemahannya masing-masing sebagai tolak ukur rendahnya nilai yang diperoleh. Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai evaluasi pada masing-masing aspek dengan harapan dapat membangun kualitas kerja di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang efektif, efisien, dan produktif serta menyelaraskan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE dari pemerintah pusat.

1 Pendahuluan

Penggunaan teknologi dalam pemerintahan, yang dikenal sebagai *e-Government*, merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan lembaga pemerintahan dan memberikan akses informasi yang diperlukan kepada masyarakat (Taqiya et al., 2020). Dalam era perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi menjadi semakin penting dengan diperkenalkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Utomo & Rosyidah, 2024). SPBE merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat (Kurnia et al., 2023). Hal ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Oleh karena itu, penerapan SPBE atau *e-government* menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penerapan teknologi informasi saat ini memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Setiap organisasi atau perusahaan harus merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang berkepentingan (Nuttah et al., 2023). Teknologi informasi memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengendalikan berbagai aspek bisnis dengan menciptakan struktur yang menghubungkan strategi dan tujuan pemerintah dengan proses teknologi informasi dan sumber daya yang ada (AlMulhim, 2023). Tata kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) adalah

sebuah konsep yang mulai dikembangkan pada tahun 1998. Konsep ini berfokus pada rangkaian hubungan atau proses yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem Teknologi Informasi (TI) mendukung serta memperluas strategi dan tujuan organisasi, memberikan manfaat yang maksimal, dan menjaga risiko pada tingkat yang dapat diterima (*The IT Governance Institute.Pdf*, n.d.). *IT Governance* adalah proses pengambilan keputusan yang memastikan adanya alokasi penggunaan teknologi informasi dalam strategi-strategi organisasi yang terkait (Hindarto, 2023).

Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dalam pengembangan *e-Government*, seperti terlihat dari peningkatan peringkat dalam E-Government Development Index (EGDI) dari tahun 2018 ke tahun 2020 (KOMINFO, n.d.). Kemudian pada tanggal 9 Maret 2020, WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, dan pemerintah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait COVID-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Akibatnya, baik Instansi Pemerintah maupun sektor pendidikan di Pusat dan Daerah mengadopsi kebijakan *work from home* sebagai alternatif dari kehadiran fisik di kantor. Menerapkan teknologi informasi menjadi solusi utama dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, seperti pembelajaran jarak jauh, layanan publik pemerintah secara daring, survei daring, konferensi web, pengembangan *telemedicine*, implementasi chatbot untuk layanan publik, dan uji coba daring (developer, 2020). Sehingga hal tersebut dan kondisi pandemi COVID-19 dari tahun 2020 hingga saat ini, menunjukkan komitmen Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai *good governance*.

Dalam upaya mempercepat implementasi *e-Government* di Indonesia dan untuk mendukung akselerasi pembangunan aparatur negara melalui Program Reformasi Birokrasi, Pemerintah telah menetapkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Tujuan dari reformasi ini adalah mencapai birokrasi yang berkelas dunia dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas, mudah, cepat, dan terjangkau. Sebagai bagian dari upaya tersebut,

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa semua instansi pemerintah harus menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bentuk integrasi *e-Government* (*PERPRES No. 95 Tahun 2018, n.d.*). Secara khusus, SPBE berkaitan dengan perubahan tatalaksana, di mana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung dengan penerapan SPBE sesuai dengan Pemantauan dan Evaluasi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan proses penilaian atas pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah, yang bertujuan untuk menentukan nilai indeks SPBE yang mencerminkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi tersebut. Evaluasi SPBE dilakukan untuk mengukur kemajuan yang dicapai dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Tumangger, 2023).

Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang bertanggung jawab atas urusan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika, telah mengadopsi prinsip Tata pemerintahan yang baik sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi *Smart City*. Dengan menerapkan *Smart City*, masyarakat di Kabupaten Probolinggo dapat dengan mudah mengakses informasi berbasis elektronik di sekitar wilayah Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan pengembangan *E-Government* dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam proses kerjanya. Penerapan SPBE memiliki dampak yang signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai ukuran kinerja bisnis di berbagai dinas dan badan daerah. Selain itu, hasil evaluasi SPBE memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam area penataan tatalaksana. Penataan tatalaksana ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai acuan dalam mengintegrasikan proses

bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menciptakan keterpaduan secara nasional (Yustisiawandana & Aji, 2024).

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo telah mencapai indeks SPBE sebesar 2.42 dan mendapatkan predikat Cukup. Dengan capaian indeks SPBE sebesar 2.42 dan mendapatkan predikat Cukup, menunjukkan bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Probolinggo belum mencapai tingkat maksimal karena adanya kelemahan dalam beberapa aspek proses kinerja.

Dengan capaian tersebut, perlu adanya upaya peningkatan indeks SPBE di Pemerintah Kabupaten Prbolinggo. Oleh karena itu mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kabupaten Probolinggo memiliki keinginan untuk menganalisis SPBE pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Analisis dilakukan pada aspek yang memiliki nilai paling rendah pada indeks SPBE di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat ini lebih diarahkan kepada mahasiswa dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja. Serta diharapkan mampu memahami dan menganalisis penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Probolinggo khususnya menganalisis aspek yang memiliki kontribusi paling rendah pada indeks SPBE.

Secara umum kegiatan PkM ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk turut serta memperdalam ilmunya salah satunya dengan cara menganalisis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Probolinggo. Analisis dilakukan pada aspek yang memiliki nilai paling rendah pada indeks SPBE di Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya analisis tersebut, rekomendasi perbaikan yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan memastikan kelangsungan implementasi SPBE.

2 Metode

Penentuan dan penerapan metode pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki peranan yang krusial, karena data yang berhasil dikumpulkan akan menjadi dasar untuk menyusun program-program yang efektif dan terstruktur dengan baik. PkM ini menggunakan pendekatan studi observasi yang menggabungkan data lapangan dan data pustaka, serta dilengkapi dengan wawancara untuk mencapai hasil yang optimal. Tujuan dari PkM ini adalah untuk menganalisis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Probolinggo. Analisis dilakukan pada aspek yang memiliki nilai paling rendah pada indeks SPBE di Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya analisis tersebut, rekomendasi perbaikan yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan memastikan kelangsungan implementasi SPBE. PkM ini didasarkan pada data lapangan yang dikombinasikan dengan data literatur. Oleh karena itu, PkM ini dapat dikategorikan juga sebagai penelitian terapan (*applied research*) yang digunakan untuk menerapkan teori di masyarakat (Hidayah & Almadani, 2022). Penelitian terapan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat, industri, dan pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Model penelitian terapan ini lebih difokuskan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan iptek (*Penelitian-Terapan_.Pdf*, n.d.). Menurut Nazir, penelitian terapan adalah proses penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan terus-menerus pada suatu masalah. Tujuannya adalah untuk menggunakannya dengan segera untuk suatu keperluan tertentu. Penelitian terapan menurut Hunt adalah penyelidikan yang dilakukan dengan cara menggunakan pengetahuan ilmiah, tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan menurut Jujun S. Sumantri, penelitian terapan merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang ada.

Penggunaan metode terapan dipilih karena dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk menyampaikan terkait kontribusi mahasiswa dalam kegiatan PkM melalui Praktek Kerja Lapangan. Dalam teknik pengumpulan data, penulis memanfaatkan metode dokumentasi dengan mengkaji bahan-bahan dokumentasi berupa literatur seperti buku dan artikel yang

relevan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini (Saputra, n.d.). Selanjutnya, dalam proses analisis data, penulis menerapkan metode studi pustaka atau riset kepustakaan. Menurut Zed dalam (Minardi, 2017), studi pustaka adalah rangkaian kegiatan yang meliputi metode pengumpulan data dari sumber pustaka, termasuk membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian, hingga mencapai tahap penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan rumusan masalah sebelumnya, tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui Praktek Kerja Lapangan terdiri dari:

a. Persiapan

Sebelum memulai kegiatan PkM ini, tahap awal yang dilakukan adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain pembekalan, penerjunan, observasi, dan wawancara. Rincian dari setiap tahapan persiapan adalah sebagai berikut:

1) Pembekalan

Pembekalan merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan PkM. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mental, fisik dan konsepsional bagi mahasiswa serta memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis kepada mahasiswa khususnya tentang teori, strategi, pendekatan, metodologi dan seperangkat materi lain yang terkait langsung dengan kegiatan PkM. Hal ini penting untuk menciptakan kondisi yang siap bagi mahasiswa sebelum mereka turun ke tempat sasaran. Pembekalan juga merupakan bagian tahapan yang harus dijalankan sesuai dengan buku pedoman yang telah ditetapkan.

Proses pembekalan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan memberikan panduan kepada mahasiswa yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Proses pembekalan juga mencakup informasi tentang persiapan yang harus dilakukan, tindakan yang diharapkan, serta larangan-larangan selama pelaksanaan PkM. Melalui peran proaktif dalam memberikan arahan dan mentoring sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan, diharapkan pengalaman positif dapat diperoleh selama pelaksanaan

kegiatan PkM, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

2) Penerjunan

Penerjunan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 01 Juni 2023, penerjunan diisi dengan kegiatan koordinasi bersama instansi/Lembaga tempat mahasiswa melaksanakan PKL, kemudian mengunjungi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo untuk menyampaikan maksud dan tujuan Praktek Kerja Lapangan yaitu sebagai media aplikasi dalam menerapkan dan mempraktikkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Disamping itu pelaksanaan PKL ini juga diharapkan agar para mahasiswa dapat mengenal kondisi dalam dunia kerja, serta mampu mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama perkuliahan.

3) Observasi dan wawancara

Setelah dilaksanakan proses penerjunan ke tempat mahasiswa melaksanakan PKL, mahasiswa menyusun instrumen observasi dan wawancara. Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. (Djaali, 2008) observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi tempat PKL dengan menggunakan berbagai metode, seperti: wawancara, pengamatan langsung atau melalui media internet.

b. Perencanaan program

Setelah melakukan observasi di lembaga penempatan, tahap berikutnya adalah menyusun perencanaan program kegiatan. Tahapan perencanaan PKL meliputi beberapa kegiatan, yaitu: 1) Mahasiswa merancang kegiatan selama PKL berdasarkan hasil observasi tempat PKL terkait analisis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 2) Mahasiswa berdiskusi dan mengonsultasikan rancangan kegiatan dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 3) Mahasiswa meminta persetujuan rancangan kegiatan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

c. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melalui Praktek Kerja Lapangan di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui beberapa program, yaitu:

1) Pencarian Referensi

Referensi adalah rujukan yang digunakan oleh mahasiswa, peneliti, penulis lepas, maupun dosen dalam menulis suatu karya ilmiah, baik itu berupa tugas kuliah, tugas akhir, skripsi, dan bahkan penelitian bagi mahasiswa atau dosen. Keberadaan referensi ini tentu saja menjadi hal yang wajib ada dan menjadi yang sesuatu yang penting untuk digunakan sebagai landasan dari karya ilmiah yang dibuat.

Hal ini dikarenakan dengan adanya referensi, seseorang penulis dapat membuktikan kredibilitas tulisannya karena referensi menjadi rujukan penting dalam kegiatan menulis untuk memperkuat argumen dari berbagai sudut pandang dan juga mendapatkan rujukan atau bukti dari sumber yang valid atau kredibel.

Jika dilihat dari pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), referensi merupakan sumber acuan (rujukan atau petunjuk). Sementara itu, pengertian referensi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris 'refer to' yang artinya adalah 'mengacu kepada' atau 'merujuk kepada' untuk sesuatu atau pernyataan seseorang.

Berdasarkan pengertian dari KBBI dan juga secara etimologi, dapat diartikan bahwa referensi merupakan sebuah rujukan yang menggambarkan mengenai informasi dari sumber terkait (*Referensi: Definisi, Tujuan, Jenis, Sumber, Dan Contoh-Contohnya*, n.d.). Tahap pencarian referensi, mahasiswa mencari referensi berupa artikel, jurnal dan referensi lainnya tentang analisis SPBE.

2) Studi Literatur

Studi literatur merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mencari ide atau sumber referensi dalam penelitian. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri

sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka.

Beberapa yang umum dan layak digunakan adalah buku-buku karya pengarang terpercaya (lebih disarankan karya akademisi), jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil-hasil penelitian mahasiswa dalam berbagai bentuk misalnya skripsi, tesis, disertasi, laporan praktikum, dan sebagainya.

Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya (Salmaa, 2023).

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengemukakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Pada tahap studi literatur ini mahasiswa akan mempelajari dan membaca dari buku, jurnal, artikel dan salinan undang-undang pemerintahan yang berkaitan dengan topik SPBE.

3) Identifikasi Aspek dan Indikator SPBE

Ada 4 domain penilaian SPBE yaitu 1. domain Kebijakan internal SPBE, 2. domain tata kelola SPBE, 3. Domain Manajemen SPBE dan 4. Domain Layanan SPBE.

Domain 1 terbagi menjadi Aspek 1. Kebijakan internal tata kelola SPBE yang terdiri dari 10 indikator penilaian. **Domain 2** terbagi menjadi Aspek 2. Perencanaan strategis yang terdiri dari 4 indikator penilaian, Aspek 3. Teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari 4 indikator penilaian, serta Aspek 4. Penyelenggara SPBE yang

terdiri dari 2 indikator. **Domain 3** terbagi menjadi Aspek 5. Penerapan manajemen SPBE yang terdiri dari 8 indikator penilaian, Aspek 6. Audit TIK yang terdiri dari 3 indikator penilaian. **Domain 4** terbagi menjadi Aspek 7: Layanan Admimistrasi Pememerintahan Berbasis Elektronik yang terdiri dari 10 indikator penilaian dan Aspek 8. Layanan Publik berbasis elektronik dengan yang terdiri dari 6 indikator penilaian.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing domain, aspek dan indikator penilaian SPBE :

a) DOMAIN 1. Kebijakan Internal SPBE

ASPEK 1. KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE

- Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Indikator 2 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Indikator 3 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Indikator 4 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
- Indikator 5 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Indikator 6 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Indikator 7 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Indikator 8 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. Evidence kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi.

- Indikator 9 : Kebijakan internal Audit TIK
- Indikator 10 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

b) DOMAIN 2. TATA KELOLA SPBE

ASPEK 2. PERENCANAAN STRATEGIS SPBE

- Indikator 11 : Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Indikator 12 : Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Indikator 13 : Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE.
- Indikator 14 : Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

c) DOMAIN 2. TATA KELOLA SPBE

ASPEK 3 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- Indikator 15 : Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE.
- Indikator 16 : Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data.
- Indikator 17 : Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Indikator 18 : Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

ASPEK 4 : PENYELENGGARA SPBE

- Indikator 19 : Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Indikator 20 : Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE.

d) Domain 3. MANAJEMEN SPBE

ASPEK 5. PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

- Indikator 21 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Risiko SPBE.
- Indikator 22 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Keamanan Informasi.
- Indikator 23 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Data.
- Indikator 24 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Aset TIK.
- Indikator 25 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Sumber Daya Manusia.
- Indikator 26 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Pengetahuan.
- Indikator 27 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Perubahan.
- Indikator 28 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Layanan SPBE.

ASPEK 6. AUDIT TIK

- Indikator 29 : Tingkat kematangan Audit Infrastruktur SPBE.
- Indikator 30 : Tingkat kematangan Audit Aplikasi SPBE.
- Indikator 31 : Tingkat kematangan Audit Keamanan SPBE.

e) Domain 4: Layanan SPBE

ASPEK 7. LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- Indikator 32 : Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik
- Indikator 33 : Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik
- Indikator 34 : Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik
- Indikator 35 : Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik

- Indikator 36 : Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
- Indikator 37 : Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik
- Indikator 38 : Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik
- Indikator 39 : Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik
- Indikator 40 : Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
- Indikator 41 : Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik
- ASPEK 8. LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
 - Indikator 42 : Layanan Pengaduan Pelayanan Publik.
 - Indikator 43 : Layanan Data Terbuka
 - Indikator 44 : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - Indikator 45 : Layanan Publik sektor 1
 - Indikator 46 : Layanan Publik sektor 2
 - Indikator 47 : Layanan Publik sektor 3

Pada tahap ini akan menjabarkan identifikasi aspek dan indikator SPBE yang memiliki kontribusi paling rendah.

d. Analisis Hasil

Tahap akhir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Praktek Kerja Lapangan adalah melakukan analisis hasil dari berbagai program yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis hasil kegiatan akan disusun menjadi laporan yang menjadi dasar untuk evaluasi dan sebagai panduan untuk tindak lanjut setelah kegiatan selesai. Analisis hasil kegiatan ini terdiri dari dua tahap, yaitu penyusunan rekomendasi dan usulan perbaikan, serta penarikan kesimpulan.

3 Hasil

Dari kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Probolinggo ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 28 2023 menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan dalam peningkatan layanan di kabupaten probolinggo antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kerjasama, kolaborasi dan keterpaduan dalam penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah dengan membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- b. Perlu adanya koordinasi dan kolaborasi melalui forum antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo dalam rangka mengoptimalkan penerapan SPBE yang terpadu dan terintegrasi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat selaras sesuai dengan tujuan nasional.
- c. Menumbuhkan kesadaran penerapan Manajemen SPBE secara menyeluruh agar terwujudnya penyelenggaraan SPBE yang optimum dan berkesinambungan.
- d. Perlu adanya penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana IPPD untuk keselarasan dan keterpaduan penerapan SPBE di lingkup Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

4 Pembahasan

a. Persiapan

Tahapan persiapan telah dilakukan dalam 3 bentuk kegiatan yaitu pembekalan, penerjunan, observasi dan wawancara dengan uraian hasil sebagai berikut:

1) Pembekalan

Pembekalan adalah tahap awal yang dilakukan dengan cara sosialisasi Praktek Kerja Lapangan dan pemberian materi-materi untuk memudahkan mahasiswa dalam pelaksanaan Praktek Kerja

Lapangan. Kegiatan pembekalan dilakukan selama 1 hari, pada tanggal 20 Mei 2023 via Google Meet. Materi yang diberikan pada saat pembekalan, antara lain : 1) Pemaparan Praktek Kerja Lapangan; 2) Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan.

2) Penerjunan

Penerjunan mahasiswa yang akan melakukan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023. Penerjunan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, meliputi; 1) Mahasiswa melakukan lapor diri dan menyerahkan surat permohonan tempat PKL ke Bakesbangpol Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo; 2) Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo membuat Surat Tugas untuk mahasiswa ke tempat PKL; 3) Koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Probolinggo dan melakukan lapor diri kepada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Probolinggo serta menyerahkan Surat Tugas dari Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo sebagai syarat bukti untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

b. Observasi dan wawancara

Observasi, yakni melakukan penilaian tingkat kematangan berdasarkan pengamatan langsung. Serta wawancara dengan pegawai instansi terkait penilaian tingkat kematangan SPBE

c. Perencanaan Program

Perencanaan program dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara, disesuaikan dengan fokus kegiatan Praktek Kerja Lapangan yaitu menganalisis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Adapun tahapan saat melakukan analisis yaitu, pencarian referensi, studi literatur, identifikasi aspek dan indikator SPBE, serta pemberian rekomendasi perbaikan yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan memastikan kelangsungan implementasi SPBE. Penyusunan rencana program dilakukan oleh mahasiswa dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

Rencana program Praktek Kerja Lapangan di Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rencana Program Kegiatan PKL

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Durasi Minggu	Uraian Kegiatan
1	Apel Pagi	Setiap hari Senin (07.30 - selesai)	4 Minggu	Kegiatan apel pagi yang melibatkan seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Probolinggo sekaligus penyampaian arahan pembina apel
2	Senam Pagi	Setiap hari Jum'at. (07.00 - selesai)	4 Minggu	Senam pagi merupakan senam dengan iringan musik, dengan tujuan membiasakan pola hidup sehat
5	Pencarian Referensi	Opsional	4 Minggu	Melakukan pencarian referensi artikel dan jurnal tentang analisis SPBE
7	Studi Literatur	Opsional	4 Minggu	Membaca dokumen hasil pemantauan dan evaluasi SPBE, dan salinan undang-undang pemerintahan yang berkaitan dengan topik untuk bahan penelitian.
8	Wawancara	Opsional	4 Minggu	Bertanya kepada pegawai instansi mengenai penilaian tingkat kematangan SPBE.
9	Identifikasi Aspek dan Indikator SPBE	Opsional	4 Minggu	Menjabarkan identifikasi aspek dan indikator SPBE

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Durasi Minggu	Uraian Kegiatan
				yang memiliki kontribusi paling rendah
10	Rekomendasi	Opsional	4 Minggu	Saran dan rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan proses kerja penerapan SPBE Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Praktek Kerja Lapangan ini disesuaikan dengan rencana program kegiatan, target dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1) Pencarian Referensi

Mahasiswa melakukan pencarian referensi tentang analisis SPBE melalui media internet. Referensi yang dicari berupa artikel jurnal dan dokumen yang berikaitan dengan topik SPBE. Dengan adanya referensi, mahasiswa dapat membuktikan kredibilitas tulisannya karena referensi menjadi rujukan penting dalam kegiatan menulis untuk memperkuat argumen dari berbagai sudut pandang dan juga mendapatkan rujukan atau bukti dari sumber yang valid atau kredibel.

2) Studi Literatur



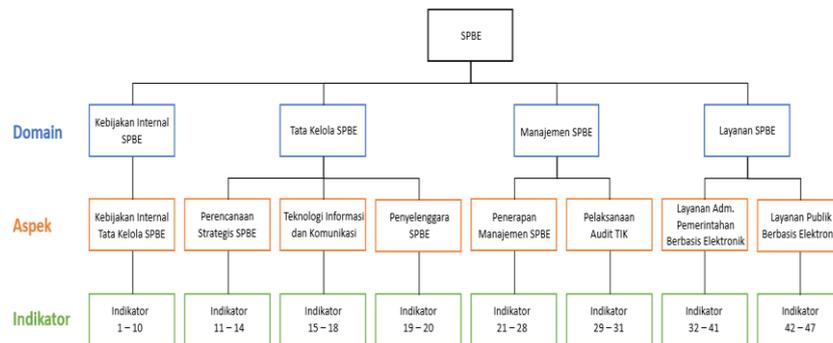
Gambar 1. Mengikuti rapat koordinasi SPBE Kabupaten Probolinggo untuk mengetahui studi literatur yang relevan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 59 Tahun 2020, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki tujuan utama yaitu memberikan layanan yang efisien kepada pengguna SPBE yang dijalankan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Evaluasi SPBE dilakukan dengan mempertimbangkan struktur penilaian yang didasarkan pada kerangka kerja tingkat kematangan SPBE, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kesiapan SPBE dalam memberikan pelayanan yang optimal. Berikut merupakan penjabaran evaluasi SPBE.

1) Struktur Penilaian SPBE

Struktur penilaian pada pelaksanaan SPBE terdiri dari domain, aspek, serta indikator. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, pelaksanaan evaluasi SPBE memiliki 45 indikator penilaian yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur pelaksanaan SPBE baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, terdapat perbedaan signifikan antara Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 dengan sebelumnya (Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018) adalah adanya tambahan

domain dan aspek baru dalam penilaian SPBE. Domain baru yang ditambahkan adalah "Manajemen SPBE" dengan aspek yaitu Penerapan Manajemen dan Audit TIK.



Gambar 2. Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Gambar 2 memperlihatkan struktur penilaian SPBE yang terdiri dari empat domain, yaitu kebijakan internal, tata kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan layanan SPBE. Setiap domain memiliki bobot persentase yang berbeda dalam proses penilaian SPBE, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah bobot di masing-masing indikator yang dapat menentukan nilai indeks untuk pemerintah pusat ataupun daerah

Nomor Domain	Nama Domain	Bobot (%)
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13,00
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00
Domain 3	Manajemen SPBE	16,50
Domain 4	Layanan SPBE	45,50
	Total Bobot	100,00

2) Tingkat Kematangan SPBE

Tingkat perkembangan SPBE diukur menggunakan kerangka kerja tingkat kematangan SPBE yang ditinjau dari dua konsep/model tingkat kematangan, yaitu tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas layanan SPBE. Setiap konsep memiliki penilaian tersendiri, dan

untuk tingkat kematangan kapabilitas proses, penilaiannya dijabarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat	Kriteria
1 – Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2 – Terkelola	Terkelola Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3 – Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.
4 – Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
5 – Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum (*Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2020*, n.d.). Tabel 3 menunjukkan bahwa domain 1, domain 2 dan domain 3 yang dapat menerapkan level kematangan kapabilitas proses dengan lima tingkatan penilaian. Di sisi lain, penilaian untuk tingkat kematangan kapabilitas layanan SPBE dijelaskan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan

Tingkat	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
4 – Kolaborasi	Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimum	Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Tabel 4 menunjukkan bahwa domain 4 menerapkan level kematangan kapabilitas layanan SPBE dengan lima tingkatan penilaian. Tingkat kematangan pelaksanaan SPBE selanjutnya dipresentasikan dengan adanya predikat SPBE.

Tabel 5. Predikat Penilaian SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Tabel 5 merupakan predikat penilaian indeks SPBE. Nilai indeks yang mempresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks dari setiap domain dikalikan dengan bobot domain yang kemudian diakumulasikan untuk menghasilkan nilai Indeks SPBE. Nilai Indeks ini kemudian dikelompokkan sesuai dengan predikat berdasarkan representasi dari tingkat kematangan SPBE.

3) Identifikasi Aspek dan Indikator SPBE

Evaluasi SPBE dilakukan dengan metode penilaian tingkat kematangan SPBE untuk mengukur level kematangan melalui evaluasi secara mandiri yang dibuktikan menggunakan data pendukung. Hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan oleh evaluator internal dan evaluator eksternal (KemenPANRB) tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo direpresentasikan pada tabel dan gambar (*Laporan Hasil Pemantauan Pemerintah Kab. Probolinggo.Pdf*, n.d.).

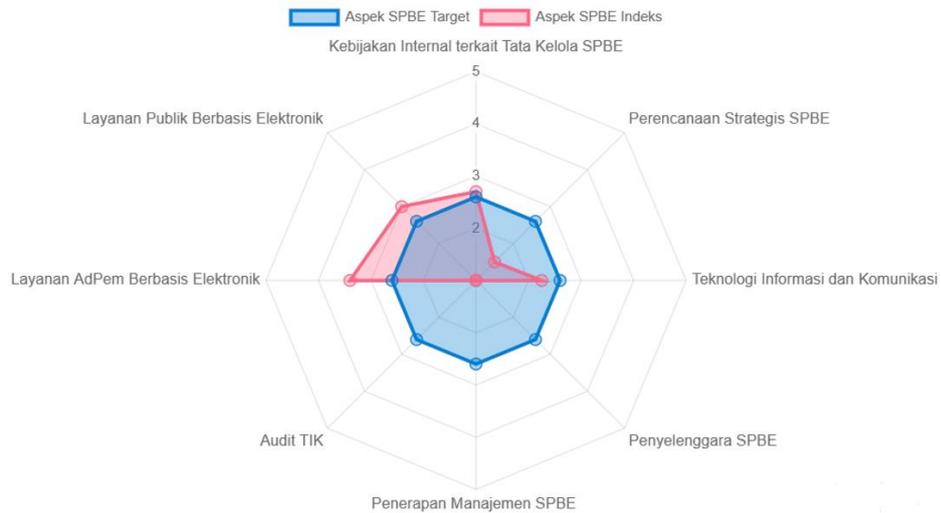
Pengukuran tingkat kematangan dilakukan secara sistematis dengan diawali menilai level tiap indikator. Selanjutnya menghitung Nilai Indeks tingkat kematangan yang terdiri dari:

- Nilai Indeks Aspek;
- Nilai Indeks Domain;
- Nilai Indeks SPBE;

Dari nilai-nilai tersebut, kemudian dihitung secara gabungan dari level tingkat kematangan Indikator. Tahapan pengukuran tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi tingkat kematangan pada PerMenPANRB 59 Tahun 2020. Akumulasi penghitungan data yang telah dilakukan menghasilkan Nilai Indeks dan predikat penilaian SPBE yang menentukan kondisi dari penerapan SPBE pada suatu Pemerintah Daerah/Instansi Pusat, adapun hasil indeks SPBE Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 pada tabel 6.

Tabel 6. Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Nama Indeks	2022	Nilai 2022
SPBE		2,42
Domain Kebijakan SPBE		2,70
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		2,70
Domain Tata Kelola SPBE		1,70
Perencanaan Strategis SPBE		1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi		2,25
Penyelenggara SPBE		1,00
Domain Manajemen SPBE		1,00
Penerapan Manajemen SPBE		1,00
Audit TIK		1,00
Domain Layanan SPBE		3,24
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,40
Layanan Publik Berbasis Elektronik		3,00



Gambar 3. Grafik Radar Indeks Tingkat Kematangan Aspek

Tabel 6 dan gambar 5 menunjukkan bahwa nilai indeks SPBE yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2022 adalah 2.42 dan mendapatkan predikat Cukup. Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan berhasil mencapai penerapan SPBE pada setiap aspek. Tetapi, hasil juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang menyebabkan kurangnya nilai indeks SPBE yang dihasilkan. Ada beberapa aspek dengan kontribusi terendah terletak pada domain Tata Kelola SPBE yaitu aspek Penyelenggara SPBE yang memperoleh nilai 1,00 dan terletak pada domain Manajemen SPBE yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan aspek Audit TIK, masing-masing aspek memperoleh nilai 1,00. Beberapa aspek tersebut memiliki indikator sebagai penilaiannya.

Adapun penjabaran mengenai masing-masing aspek yang memiliki nilai paling rendah sebagai berikut;

a) Aspek Penyelenggara SPBE

Aspek Penyelenggara SPBE memiliki dua indikator, yaitu Indikator Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah dan Indikator Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE. Penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE secara keseluruhan telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo yaitu terdapat Tim

Koordinasi SPBE. Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum mempunyai kegiatan kolaborasi sebagai pendukung pelaksanaan SPBE. Adapun perolehan Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,00. Kemudian pada Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,00.

b) Aspek Penerapan Manajemen SPBE

Aspek Penerapan Manajemen SPBE memiliki delapan indikator, yaitu:

- Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE,
- Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi,
- Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data,
- Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK,
- Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia,
- Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan,
- Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan, dan
- Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

Secara keseluruhan penerapan pada Manajemen SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo karena belum terdapat bukti perencanaan sebagai pondasi awal dari pelaksanaan manajemen SPBE. Pemerintah Kabupaten Probolinggo masih belum memiliki perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data dan Manajemen Perubahan.

Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK. Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan sesuai dengan perencanaan tetapi kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE belum terpenuhi seluruhnya, Manajemen Pengetahuan telah dilaksanakan tanpa pedoman. Sedangkan Manajemen Layanan SPBE masih belum dilaksanakan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE. Adapun perolehan Tingkat Kematangan pada masing masing indikator di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,00.

c) Aspek Audit TIK

Aspek Audit TIK memiliki tiga indikator, yaitu Indikator Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Indikator Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Indikator Tingkat Kematangan Pelaksanaan Keamanan SPBE. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo baik dari Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE, karena belum adanya dokumen perencanaan kegiatan audit TIK. Adapun perolehan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,00. Kemudian pada Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,00. Pada Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,00.

5 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui praktek kerja lapangan ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian diri kepada masyarakat dengan memberikan dampak yang signifikan kepada pihak yang bersangkutan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan nasional di Indonesia melalui pemberdayaan mahasiswa. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mendarmabaktikan kecakapan serta ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Kegiatan PkM ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh pihak internal dan eksternal yang relevan, yaitu: 1) Persiapan, meliputi: pembelakalan, penerjunan, observasi dan wawancara; 2) Perencanaan program; 3) Pelaksanaan, meliputi: pencarian referensi, studi literatur, identifikasi aspek dan indikator SPBE, rekomendasi; 4) Analisis hasil.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo telah mencapai indeks SPBE sebesar 2.42 dan mendapatkan predikat Cukup. Beberapa aspek penilaian SPBE direpresentasikan memiliki nilai kontribusi sangat rendah yang mengakibatkan kurangnya nilai indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yaitu:

- a. Aspek Penyelenggara SPBE dengan dua indikator penilaiannya (Indikator 19 Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah dan Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE),
- b. Aspek Penerapan Manajemen SPBE dengan delapan indikator penilaiannya (Indikator 21 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Indikator 22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data, Indikator 24 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK, Indikator 25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Indikator 26 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan, Indikator 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan, dan Indikator 28 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE), dan
- c. Aspek Audit TIK dengan tiga indikator penilaiannya (Indikator 29 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Indikator 30 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Indikator 31 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Keamanan SPBE).

Masing-masing aspek memiliki kelemahannya masing-masing sebagai tolak ukur rendahnya nilai yang diperoleh. Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai evaluasi pada masing-masing aspek dengan harapan dapat membangun kualitas kerja di Pemerintah Kabupaten Probolinggo

yang efektif, efisien, dan produktif serta menyelaraskan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE dari pemerintah pusat.

6 Pengakuan

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang bersangkutan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Probolinggo yang telah mendukung penuh kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

7 Referensi

- AlMulhim, A. F. (2023). The impact of administrative management and information technology on e-government success: The mediating role of knowledge management practices. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2202030. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2202030>
- developer, medcom id. (2020, April 20). *Strategi Pemerintah dan Masyarakat di Era Disrupsi Covid-19*. medcom.id. <https://www.medcom.id/pilar/kolom/VNnXIR2k-strategi-pemerintah-dan-masyarakat-di-era-disrupsi-covid-19>
- Hidayah, E. S., & Almadani, M. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(2), 49–67. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i2.2680>
- Hindarto, D. (2023). The Management of Projects is Improved Through Enterprise Architecture on Project Management Application Systems. *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.35870/ijsecs.v3i2.1512>
- KOMINFO, P. (n.d.). *Hasil Survei PBB, e-Government Indonesia Naik Peringkat*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Retrieved July 24, 2023, from <http://content/detail/30024/hasil-survei-pbb-e-government-indonesia-naik-peringkat/0/artikel>

Kurnia, R. R., Saputro, G. E., & Murtiana, S. (2023). Management of human resources in national defense depend on defense economics point of view. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.35335/ijosea.v13i1.201>

Laporan Hasil Pemantauan Pemerintah Kab. Probolinggo.pdf. (n.d.).

Minardi, M. (2017). Menepis Ratu Adil Sebagai Ramalan Dan Menghadirkan Ratu Adil Sebagai Wacana Kepemimpinan. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 1, 79. <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v1i1.63>

Nuttah, M. M., Roma, P., Lo Nigro, G., & Perrone, G. (2023). Understanding blockchain applications in Industry 4.0: From information technology to manufacturing and operations management. *Journal of Industrial Information Integration*, 33, 100456. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2023.100456>

Penelitian-Terapan_.pdf. (n.d.). Retrieved July 28, 2023, from http://puslit.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Penelitian-Terapan_.pdf

Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2020. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved July 24, 2023, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/150381/permen-pan-rb-no-59-tahun-2020>

PERPRES No. 95 Tahun 2018. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved July 24, 2023, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>

Referensi: Definisi, Tujuan, Jenis, Sumber, dan Contoh-Contohnya. (n.d.). Retrieved July 29, 2023, from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-referensi/>

Salmaa. (2023, March 17). Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya. *Penerbit Deepublish*. <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>

Saputra, S. Y. (n.d.). *Permainan Tradisional Vs Permainan Modern Dalam Penanaman Nilai Karakter Di Sekolah Dasar*.

Taqiya, N. A., Mukaromah, S., & Pratama, A. (2020). Analisis Tingkat Kematangan Spbe Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa Timur. *SCAN - Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, *15*(1), 22–33. <https://doi.org/10.33005/scan.v15i1.1849>

The ITGovernance Institute.pdf. (n.d.).

Tumangger, D. (2023, February 10). *16 Instansi Pemerintah Berpredikat Sangat Baik Tauval SPBE 2022*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/16-instansi-pemerintah-berpredikat-sangat-baik-tauval-spbe-2022>

Utomo, T., & Rosyidah, R. (2024). Authentic followership in Madurese Public Organization: The role of authentic leadership. *E3S Web of Conferences*, *499*, 01001. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449901001>

Yustisiawandana, F. T., & Aji, R. F. (2024). Perancangan Enterprise Architecture untuk Meningkatkan Indeks SPBE Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *6*(1), 187–199. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i1.1133>